

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Setiap masyarakat tentu berharap untuk hidup dengan baik dan makmur, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1 yang menyebutkan: "Setiap individu berhak untuk hidup sejahtera baik secara fisik maupun mental, memiliki tempat tinggal, mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak atas layanan kesehatan." Pernyataan tersebut menegaskan hak masyarakat untuk tinggal di tempat yang layak, yang dijamin oleh pemerintah¹. Namun nyatanya masih banyak tempat di Indonesia masih banyak pemukiman-pemukiman kumuh yang tidak layak di tempati oleh masyarakat, masih banyak program pemerintah yang tertinggal yang menyebabkan kesenjangan sosial, kemiskinan, tempat tinggal yang layak, dan pengelolaan sumber daya alam lingkungan yang belum baik.

Indonesia adalah negara yang luas dengan populasi terbesar keempat di seluruh dunia, mencapai sekitar 270,20 juta orang. Tingginya jumlah penduduk berpengaruh besar terhadap kualitas hidup warga, karena kepadatan penduduk yang tinggi dapat menimbulkan banyak isu terkait populasi, seperti kemiskinan, kebutuhan akan tempat tinggal, kesempatan kerja, dan lainnya.² Kepadatan penduduk adalah masalah besar yang

¹Anisa Fitri, Herlina Sakawati, dan Muh. Nur Yamin, *Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone*, Vol.1 No.1, Jurnal Aktor 2021, Hlm 26

²Damayanti Triyastuti, *Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Dan 2017*, Surakarta: UMS 2019 Hlm 6.

dihadapi oleh kota-kota. Penyebaran penduduk yang tidak merata dapat menyebabkan berbagai isu, salah satunya adalah adanya pemukiman kumuh.

Pemukiman kumuh adalah area tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat untuk dihuni, karena adanya ketidakaturan dalam struktur bangunan, kepadatan bangunan yang sangat tinggi, serta kualitas bangunan dan fasilitas yang tidak cukup baik. Kita bisa mengatakan bahwa pemukiman kumuh adalah tempat tinggal yang kualitasnya menurun. Penurunan kualitas ini ditunjukkan oleh bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang yang seharusnya, kepadatan penduduk yang tinggi, berisiko terkena penyakit sosial, kualitas bangunan yang buruk, serta minimnya sarana dan prasarana yang memadai yang dapat menyebabkan masalah kesehatan lingkungan. Jadi, pemukiman kumuh bisa disimpulkan sebagai tempat tinggal yang tidak layak karena adanya ketidakaturan bangunan, kepadatan yang berlebihan, dan kekurangan sarana serta prasarana yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan di lingkungan sekitarnya.

Indonesia memiliki 38.431 Ha permukiman kumuh yang tersebar di 2.883 kawasan di 515 Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia. Pemerintah berupaya mentaskan kawasan kumuh dengan menggulirkan suatu program yang diberi nama Program Kota Tanpa Kumuh yang diatur dalam Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program nasional yang dilaksanakan di 269 Kota/ Kabupaten di 34 Provinsi di Indonesia.³ Program KOTAKU dijalankan untuk membangun sistem untuk penanganan pemukiman kumuh yang berada di perkotaan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah melebarinya kawasan kumuh yang berada di perkotaan.

Program Kota Tanpa Kumuh (kotaku) adalah salah satu dari beberapa upaya Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menangani sejumlah permukiman kumuh yang ada di Indonesia dengan mendukung Gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Maksud dari kebijakan pembangunan dari Direktorat Jendral Cipta Karya adalah membuat sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan juga fasilitas komunitas. Program KOTAKU ini akan menangani wilayah kumuh dengan cara kolaborasi antara pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat⁴.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kawasan perumahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, Kota Jambi adalah salah satu kota di Provinsi Jambi yang menjadi target sasaran program KOTAKU. Luas geografis Kota Jambi adalah 20.538 hektar,

³ Angesti Widia Palup, *Op.Cit.*, 6.

⁴ Sri Mulyati, dan Jetendra, *Sistem Pendukung Program Keputusan Program KOTAKU di Wilayah Seberang Kecamatan Pelayangan Kota Jambi*, Jambi: STIMIK Nurdin Hamzah Jambi, hlm. 4

dengan 8 kecamatan dan 55 kelurahan. Dari luasan tersebut, 60% wilayah sudah dihuni oleh orang. Pada 2018, terdapat 968 hektare permukiman kumuh di Kota Jambi, tetapi pada tahun 2020, jumlah ini meningkat menjadi 980 hektare.⁵

Perkembangan kota jambi menuntuk pemerintah untuk terus melakukan Pembangunan di berbagai sektor. Dalam rangka mengurangi jumlah pemukiman kumuh di Kota Jambi, pemerintah provinsi melanjutkan program Kota Tanpa Kumuh pada tahun 2020. Program ini mencakup 986,57 hektare kawasan kumuh pada tahun 2020, tetapi pada akhir tahun 2021 hanya tersisa 148,64 hektare.⁶

Berdasarkan data diatas, terjadi penurunan yang sangat signifikan. Dikutip dari skripsi Lucky Putri Agriyani Zebua bahwa Kecamatan yang mengalami perkembangan yang pesat dengan adanya program Kotaku ini ialah Kecamatan Telanaipura. Program KOTAKU mengubah banyak fasilitas di Telanaipura. Jalan lingkungan sepanjang 277 meter dan 633 drainase telah dibangun. Selain itu, Kelurahan Telaipura menikmati akses jalan yang baik, drainase yang memadai, dan Ruang Pendidikan setelah pembangunan teras baca dan Ruang Terbuka Publik (RTP).⁷

⁵ Program Kotaku, Tahun Ini Kota Jambi Hanya Dua Kelurahan yang Dapat Alokasi, <https://jambiexpres.disway.id/read/128387/program-kotaku-tahun-ini-kota-jambi-hanya-dua-kelurahan-yang-dapat-alokasi> , diakses pada 08 April 2023 Pukul 10.45 WIB.

⁶ Website Kota Jambi Satu Peta Satu Data, Diakses Pada 30 November 2024 Pukul 21.03 WIB

⁷ Skripsi Lucky Putri Agriyani Zebua, "Analisis Efektivitas Kebijakan KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Pengentasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi" Jambi: Unja 2021 Hal.7

Dalam buku yang ditulis oleh Khotib Syarbini, S.E., yang berjudul *Pengelolaan dan Pengetahuan Program KOTAKU di Kota Jambi*, dijelaskan bahwa Kelurahan Orang Kayo Hitam juga telah berhasil mengurangi wilayah kumuh secara keseluruhan. Pembangunan pusat kuliner kota, ruang terbuka publik, pembangunan drainase, pembangunan jalan lingkungan, dan perencanaan pembangunan yang lebih baik. Salah satunya adalah perubahan untuk RT 11, yang sebelumnya merupakan wilayah terisolasi. Program KOTAKU ini juga mengubah kelurahan Cempaka Putih secara signifikan. Pembangunan peningkatan jalan di empat RT di Kelurahan Cempaka Putih telah dilakukan oleh BPM Reguler Kota Jambi berdasarkan rencana pengurangan kawasan kumuh.

Keberhasilan demi keberhasilan beberapa Kelurahan diatas tentunya didukung oleh berbagai faktor terutama peranan masyarakat dalam mengikuti program KOTAKU. Dalam buku praktik baik Program KOTAKU dipaparkan berbagai macam keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pembangunan melalui Program KOTAKU. Seperti di Kelurahan Telanai peran masyarakat dalam memberikan edukasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Masif dilakukan antar Rukun Tetangga. Selain itu dorongan kepada anak-anak untuk dapat memanfaatkan pojok taman baca juga terus dilakukan demi menciptakan generasi yang cerdas dan gemar membaca. Praktik baik terkait partisipasi masyarakat tersebut juga diikuti oleh masyarakat di Kelurahan Orang Kayo Hitam yang berperan aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan, salah satunya program

Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) yang bertujuan menjadikan masyarakat memiliki penghasilan tambahan diluar pekerjaan utamanya. Selanjutnya yang menjadi sorotan ialah terbukanya wilayah yang terisolir menjadi kawasan berjualan wisata kuliner yang diinisiasi oleh masyarakat kelurahan orang kayo hitam.

Tujuan program KOTAKU adalah untuk memberi pemerintah daerah kesempatan untuk bekerja sama dengan spemangku kepentingan. Tujuan lain dari program KOTAKU adalah untudk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman. Dengan demikian, kesejahteraan dapat ditingkatkan melalui pengembangan kualitas kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Hal ini dicapai melalui upaya di wilayah kumuh dengan membangun infrastruktur dan memberikan pendampingan sosial dan ekonomi.

Program KOTAKU menekankan peran pemerintah daerah sebagai nahkoda utama dalam mengarahkan dan mensinergikan segala bentuk kolaborasi antar pihak untuk mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh, terutama di mana masyarakat adalah subjek pembangunan yang aktif. Rencana yang dibuat tidak hanya harus menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga harus didasarkan pada visi penataan permukiman untuk membuat Kabupten atau Kota layak huni. Visi ini harus sesuai dengan visi dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten atau Kota, serta rencana pembangunan lainnya.⁸

⁸ Anisa Fitri, Herlina Sakawati, dan Muh. Nur Yamin, *Op.Cit.*, hlm 27.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan di kota lain, aspek kelembagaan merupakan strategi penting dalam menangani permasalahan permukiman kumuh. Mengembangkan kerjasama antar instansi dalam struktur pemerintahan baik pusat maupun daerah untuk membangun koordinasi dan konsolidasi khususnya dalam pelaksanaan program pembangunan, serta untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan di bidang pembangunan permukiman melalui peningkatan manajemen, kualitas sumber daya manusia, dan sebagainya dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Selain itu, kerjasama atau kemitraan antar pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mempercepat pembangunan dan membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak, baik individu maupun kelembagaan.

Pelaksanaan program KOTAKU di Kota Jambi juga disokong peranan *stakeholders* yang berupaya menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mengambil bagian dalam program pengentasan kawasan kumuh ini. Sehingga peneliti ingin melihat lebih dalam bagaimana kerja sama pemerintah menjadi strategi keberhasilan program KOTAKU di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi tidak hanya melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menangani program ini melainkan juga pihak swasta dan tentunya masyarakat. OPD yang menangani pun tidak hanya terbatas disatu OPD melainkan dibebberapa OPD lainnya. Begitu pun ditingkat pusat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak hanya menangani permasalahan ini sendiri melainkan juga

dibantu oleh beberapa Kementerian terkait. Sangat tidak memungkinkan jika program ini ditangani oleh beberapa pihak saja, penanganan ini membutuhkan banyak aktor yang tentunya dapat diajak berkolaborasi dalam mengentaskan permasalahan permukiman kumuh.

Kerjasama yang didukung oleh banyak pihak ini tentunya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan ruang kolaborasi dan mengembangkan kelembagaan serta membangun jaringan penanganan permasalahan permukiman kumuh mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat. Penanganan permukiman kumuh merupakan acuan bagi pemerintah untuk membangun kapasitas pemerintah serta masyarakat agar mampu melaksanakan dan mengelola wilayahnya secara mandiri dengan menerapkan tata kelola yang baik.

Berdasarkan hal inilah, penelitian ini lebih menekankan konsep Strategi Kerja Sama Pemerintah sebagai salah satu strategi keberhasilan program KOTAKU agar permasalahan permukiman kumuh di Kota Jambi bisa diselesaikan dengan tepat sasaran, apabila permasalahan ini tidak ditangani dengan baik dan tidak efektif maka dapat dipastikan luas permukiman kumuh di Kota Jambi akan terus meningkat setiap tahunnya.

Sebagaimana informasi diatas yang memaparkan bahwa program KOTAKU dilaksanakan di Kota Jambi pada tahun 2016 dengan luasan wilayah kumuh seluas 986,57 hektare mengalami perubahan signifikan dengan hanya tersisa sebanyak 148,64 Hektare wilayah kumuh pada akhir tahun 2021. Peneliti ingin menganalisa bagaimana Strategi Kerja sama

Pemerintah dalam mewujudkan keberhasilan program KOTAKU di Kota Jambi.

Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi untuk memenuhi sudut pandang yang lain. Pertama, penelitian yang dilakukn oleh Lucky Putri Agriani Zebua dengan judul “Analisis Efektivitas Kebijakan KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Pengan tasan Permukiman Kumuh diKelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Program KOTAKU dalam mencegah kawasan kumuh baru di Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program KOTAKU di Desa Legok adalah penanganan kawasan kumuh dengan gerakan “100-0-100”. layak huni, dan masih banyak permukiman yang belum terlayani jalan lingkungan, drainase yang disediakan kurang memadai, masih banyak masyarakat yang belum mempunyai fasilitas sanitasi yang baik dan belum tersedia dengan baik dimana tempat pembuangan sampah yang disediakan juga tidak digunakan dengan baik. ,akses terhadap keselamatan kebakaran tidak memadai. Tingkat kekumuhan di wilayah Desa Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi berada pada tingkat kekumuhan parah. Sedangkan masyarakat dalam pelaksanaan Program KOTAKU di Kota Jambi berada pada tingkat partisipasi sedang.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurazizah Amiruddin yang berjudul“Collaborative Governance: Dalam Upaya Penanganan Pemukimn Kumuh Melalui Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Di Kabupaten

Bulukumba”. Pada penelitian ini peneliti melihat bagaimana proses *collaborative governanace* melalui Program Kotaku di Kelurahan kalumeme dalam upaya menanggulangi Kawasan kumuh, serta peran setiap stakeholder yang terlibat dalam proses kolaborasi program Kotaku di Kelurahan kalumeme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses kolaborasi program Kotaku di Kelurahan kalumeme sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Dukungan dari setiap pihak yang terlibat juga sangat baik terhadap program ini. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya terkait pelaksanaan program yang masih lambat ditangani. Selain itu permasalahan pembebasan lahan yang sering menjadi kendala dan berujung konflik.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Alfiandi Wirawan Saputra yang berjudul “Implementasi Program Pengentasan Wilayah Kumuh Di kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng”. Penelitian ini mengkaji Kebijakan Sosial Pengentasan Wilayah Kumuh pada Program KOTAKU sebagai program yang digunakan untuk mengatasi kawasan kumuh. Penelitian ini menjelaskan tujuan dari Program KOTAKU adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Pengentasan Wilayah Kumuh Di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng sudah terealisasi secara maksimal dilihat dari (1) penataan lingkungan

yang sudah terealisasi; (2) penyediaan jamban keluarga yang belum terealisasi sehingga masih ada masyarakat yang jamban di pinggir pantai; (3) pasokan air yang layak konsumsi sudah terealisasi secara maksimal.

Penulis mencoba menghadirkan sudut pandang yang baru di tengah beberapa penelitian terdahulu yang sudah ada, Dimana peneliti terdahulu mengenai program KOTAKU di Kota Jambi mengkaji aspek implementasi kebijakan dan partisipasi masyarakat di dalamnya prosesnya. Adapun penelitian pada referensi yang peneliti gunakan dilakukan di wilayah yang berbeda dengan kondisi lingkungan yang berbeda pula. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilatarbelakangi implementasi program KOTAKU di Kota Jambi yang menggunakan Strategi Kerja Sama Pemerintah dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang peneliti paparkan diatas peneliti berharap dapat memenuhi ruang kosong dalam penelitian sebelumnya dengan mengusung judul penelitian sebagai berikut, “Strategi Pengelolaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kota Jambi

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Strategi Pengelolaan Program KOTAKU di Kota Jambi?
- 2) Apa saja factor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Program KOTAKU di Kota Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui Strategi Pengelolan Program KOTAKU di Kota Jambi.
- 2) Untuk mengetahui Peran kerja sama pemerintah dalam pengelolaan Program KOTAKU di Kota Jambi.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis: untuk dapat mengetahui lebih banyak tentang pengelolaan Program KOTAKU di Kota Jambi dan gunakan informasi ini untuk menambah pengetahuan dan diskusi ilmiah di bidang ilmu pemerintahan, terutama kebijakan publik.
- 2) Manfaat Praktis: Penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan atau rekomendasi bagi pemerintah Provinsi Jambi tentang pengelolaan Program KOTAKU di Kota Jambi agar program dapat berjalan dengan baik.

1.5. Landasan Teori

Teori membantu peneliti menganalisis masalah lapangan. Beberapa teori akan menjelaskan indikator dan masalah, serta alat untuk memecahkan masalah sesuai dengan variabel dan topik penelitian. Ini adalah beberapa teori yang digunakan peneliti.

1. Strategi Pengelolaan

a) Pengertian Strategi

Strategi bisa dikatakan cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bintaro mengartikan bahwa strategi sebagai keseluruhan langkah-langkah (kebijaksanaan) dengan perhitungan pasti, guna mencapai suatu tujuan untuk mengatasi suatu permasalahan, dimana dalam strategi itu terdapat metode dan teknik. Strategi mencerminkan kesadaran organisasi mengenai bagaimana, kapan, dan dimana ia harus bersaing; melawan siapa; dan untuk maksud apa. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing.

George Stainner dan Jhon Minner mengatakan bahwa strategi adalah penempatan misi dan sasaran organisasi secara akurat, serta mempertimbangkan faktor internal dan eksternal saat merancang kebijakan tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya dengan tepat. sehingga tujuan utama dapat dicapai⁹.

Seperti yang dikutip oleh Sukristono dalam buku Husein Umar, Stephani K. Marrus Strategi didefinisikan sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh para pemimpin puncak untuk membuat rencana untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Selain itu, strategi juga mencakup pengembangan metode atau upaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Strategi, menurut Quinn, didefinisikan sebagai suatu bentuk dan rencana yang menggabungkan kebijakan, tujuan utama, dan tindakan organisasi agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Strategi dirancang dengan baik untuk membantu mengatur dan mengalokasikan sumber daya

⁹ Harin tiawon dkk, Kajian Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Berbasis Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Di Kota Kuala Kapuas, Volume 2, No. 1, Oktober 2018 Hal 2

perusahaan sehingga menjadi unik dan bertahan lama. Strategi yang matang didasarkan pada kemampuan kelemahan internal dan perubahan lingkungan.

Dari pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah metode untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi penyesuaian digunakan untuk menciptakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu yang dapat dianggap penting. Dalam strategi ini, tindakan penyesuaian dilakukan dengan bijak dan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan masing-masing agar lebih efektif.

Sebuah definisi yang diberikan oleh Charles Hofer, Higgins, adalah Enterprise Strategy, yang berkaitan dengan respons masyarakat, yang dapat digunakan untuk membangun strategi untuk organisasi pemerintah. Setiap strategi bergantung pada masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan individu atau kelompok individu yang tidak terorganisir.

b) Pengertian Pengelolaan

Menurut Admosudirjo, Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumberdaya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan tujuan tertentu. Sedaangkan menurut Balderton dalam Adisasmita istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.¹⁰

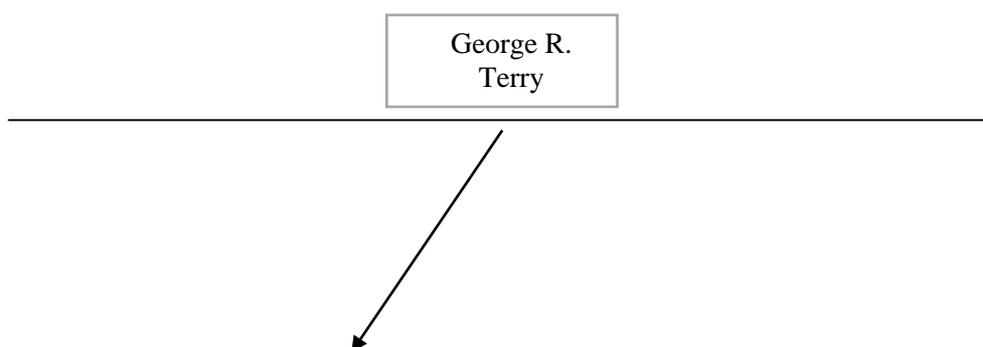
¹⁰ Adrius Nagong, Studi Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, Vol 8 Desember 2028, Hal 3

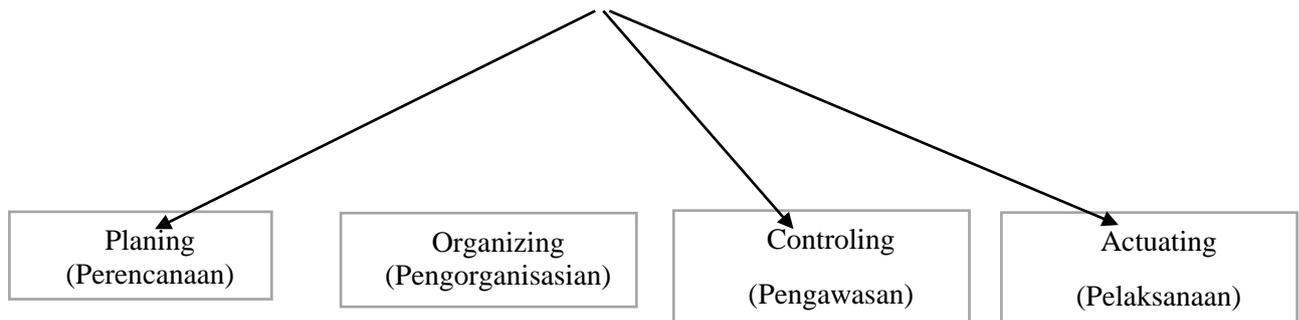
George R. Terry menjelaskan kemudian manajemen sebagai suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan dan mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan adalah suatu proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengertian dasar manajemen adalah menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan menjadi satu rangkaian kegiatan yang berurutan untuk mencapai tujuan tersebut.

c) Indikator Strategi Pengelolaan

Dalam bukunya "Prinsip-prinsip Manajemen", George R. Terry membagi empat fungsi dasar yang berfungsi sebagai model dasar dari strategi pengelolaan untuk membantu organisasi atau bisnis mencapai tujuan mereka, yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan Controlling (Pengawasan). Berikut sebagaimana model 4 (empat) fungsi pengelolaan dalam proses tata kelola yang dikenalkan oleh George R. Terry.

Gambar. 1.1.
Model Fungsi Pengelolaan George R. Terry





1. Perencanaan (Planning)

Menurut Bintoro Tjokroaminoto, perencanaan adalah proses menyusun berbagai kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan, menurut prajudi atmosudirdjo, adalah perhitungan dan penentuan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk siapa yang akan melakukannya, kapan, di mana, dan bagaimana.

Menurut George R. Terry “Perencanaan adalah pemilihan fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan”.¹¹

Planning ataupun perencanaan merupakan langkah awal yang harus diperbuat dalam sebuah organisasi ataupun bisnis dalam memikirkan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dicapai kedepannya contoh kecilnya membuat sebuah VISI dan MISI

¹¹ Rifaldi Dwi Dkk, Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry, Vol.1, No.3 Agustus 2023

sehingga organisasi ataupun bisnis yang kita jalankan mengetahui arah dan tujuannya.

Walaupun George Terry tidak secara eksplisit merinci "indikator penilaian" dalam bentuk daftar sebagaimana konsep manajemen modern saat ini, prinsip-prinsip dan elemen-elemen perencanaan dalam teorinya dapat dijadikan dasar untuk menilai kualitas perencanaan. Berikut adalah indikator penilaian perencanaan yang dapat diturunkan dari teorinya:¹²

a) Tujuan yang Jelas (Objectives Clarity)

Salah satu indikator utama dalam menilai kualitas perencanaan berdasarkan teori George Terry adalah kejelasan tujuan. Perencanaan yang efektif harus dimulai dengan menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, realistis, dan dapat dicapai (SMART). Tujuan yang jelas menjadi fondasi utama bagi seluruh proses perencanaan, karena tanpanya, langkah-langkah strategis yang diambil akan kehilangan arah dan makna. Kejelasan ini mencakup perumusan tujuan secara konkret artinya tujuan tersebut tidak bersifat umum atau kabur, melainkan dirumuskan secara rinci dan dapat dievaluasi pencapaiannya. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi apakah tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu rencana benar-benar mencerminkan kebutuhan organisasi serta dapat diukur keberhasilannya dalam praktik.

b) Alternatif Tindakan (Alternatives Consideration)

¹² Terry, George R. *Principles of Management*. Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 1960.

Dalam prinsip-prinsip perencanaan menurut George R. Terry, mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana yang efektif. Perencanaan yang baik tidak hanya berfokus pada satu jalur solusi, tetapi juga membuka ruang bagi beragam opsi yang dapat dipertimbangkan untuk mencapai tujuan. Dengan menyusun beberapa alternatif tindakan, perencana memiliki kesempatan untuk membandingkan dan mengevaluasi setiap pilihan berdasarkan potensi manfaat dan risikonya. Proses ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih rasional dan terukur, karena keputusan yang diambil tidak bersifat impulsif atau berdasarkan asumsi tunggal. Evaluasi terhadap keuntungan dan kerugian masing-masing alternatif membantu memilih opsi terbaik yang paling efisien dan sesuai dengan kondisi serta sumber daya yang tersedia

c) Program dan Strategi Pelaksanaan (Program/Implementation Strategy)

Salah satu elemen penting dalam perencanaan yang efektif menurut George R. Terry adalah adanya program dan strategi pelaksanaan yang terstruktur. Perencanaan tidak cukup hanya berhenti pada penetapan tujuan dan pemilihan alternatif; ia harus dilengkapi dengan langkah-langkah operasional yang konkret untuk mewujudkan tujuan tersebut. Program pelaksanaan mencakup rincian tentang apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan sumber daya apa saja yang dibutuhkan. Pembagian tugas yang jelas, penetapan waktu pelaksanaan, serta alokasi sumber daya secara tepat sangat krusial agar

pelaksanaan berjalan sesuai rencana. Dengan adanya strategi implementasi yang sistematis, proses pelaksanaan menjadi lebih terarah dan terukur, serta meminimalkan risiko hambatan selama tahap eksekusi

d) Fleksibilitas dan Antisipasi Risiko (Flexibility and Risk Planning)

Merupakan aspek penting dalam perencanaan yang mencerminkan kemampuan suatu organisasi atau individu untuk merespons dinamika dan ketidakpastian dalam pelaksanaan kegiatan atau proyek. Fleksibilitas dalam perencanaan mengacu pada sejauh mana rencana tersebut dapat disesuaikan atau diubah dengan cepat ketika terjadi perubahan situasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Rencana yang fleksibel memungkinkan penyesuaian strategi, alokasi sumber daya, serta pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap kondisi yang tidak terduga.

e) Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency and Effectiveness)

Efisiensi dan efektivitas merupakan dua prinsip utama dalam perencanaan yang saling melengkapi dan menentukan keberhasilan suatu program atau kegiatan. Kombinasi antara efisiensi dan efektivitas menunjukkan bahwa suatu rencana tidak hanya dilakukan dengan cara yang benar (doing things right), tetapi juga mengarah pada hal yang benar (doing the right things). Oleh karena itu, perencanaan yang baik harus

mempertimbangkan penggunaan sumber daya secara bijak sekaligus menjamin pencapaian hasil secara optimal

Dari lima indikator diatas dapat menjadi acuan dalam melakukan penilaian terhadap perencanaan suatu program apakah telah dilaksanakan dengan baik atau sebaliknya.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Organizing sama dengan pengorganisasian. Menurut pengertian, ini adalah sebuah kelompok yang memungkinkan orang-orang di dalamnya bergerak sesuai dengan aturan kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Karena hal ini akan berdampak pada proses keberhasilan manajemen dalam hal-hal kecil, seperti menentukan siapa yang akan bertindak sebagai pemimpin, sekretaris, bendahara, dan bidang lainnya, serta membuat jobdesk untuk setiap struktur. Ini akan mempermudah proses manajemen untuk mencapai tujuan dan melakukan hal-hal dengan benar.

Menurut Handoko istilah dari pengorganisasian:

- 1) cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif terhadap sumber daya keuangan, fisik, bahan baku, dan tenaga keorganisasian,
- 2) bagaimana organisasi mengelompokan kegiatannya, dimana setiap pengelompokan diikuti penugasan seorang manajer yang diberi wewenang mengawasi anggota kelompok,

- 3) hubungan antara fungsi, jabatan, tugas karyawan
- 4) cara manajer membagi tugas yang harus dilaksanakan dalam departemen dan mendelegasikan wewenang untuk mengerjakan tugas tersebut.¹³

George R. Terry mengatakan, Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai) terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok untuk keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.¹⁴

Dengan demikian, pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan orang sehingga mereka dapat bergerak bersama sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan. Dalam suatu wadah kelompok atau organisasi, organisasi adalah tindakan yang menyatukan, untuk, dan kuat. Ini dilakukan dengan membagi berbagai tugas, tetapi secara keseluruhan, agar anggota atau staf dapat bekerja dengan baik dan memiliki rasa tanggung jawab dan kebersamaan.

Parameter penilaian pengorganisasian berikut dapat diambil dari prinsip-prinsip George Terry:¹⁵

a) Struktur Organisasi yang Jelas (Clear Organizational Structure)

¹³ Rifaldi Dwi Dkk, Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry, Vol.1, No.3 Agustus 2023,

¹⁴ *Ibid* Hal 2

¹⁵ Terry, George R. *Principles of Management*. Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 1960.

Struktur organisasi yang jelas merupakan fondasi utama dalam proses pengorganisasian. Struktur ini menunjukkan susunan formal dari hubungan antarbagian dalam organisasi, termasuk jalur komando, tanggung jawab, serta hubungan kerja antarunit. Penetapan struktur yang formal membantu menciptakan keteraturan dan kepastian dalam pelaksanaan tugas, sehingga setiap individu memahami posisi dan perannya dalam organisasi. Kejelasan mengenai wewenang dan tanggung jawab di setiap bagian sangat penting untuk mencegah kebingungan, tumpang tindih tugas, serta memperlancar proses koordinasi dan pengambilan keputusan.

b) Pembagian Tugas yang Tepat (Proper Division of Work)

Pembagian tugas yang tepat bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan diberikan kepada individu atau unit yang memiliki keahlian dan kapasitas sesuai. Proses ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga memaksimalkan potensi sumber daya manusia. Kejelasan dalam uraian tugas (job description) menjadi hal penting untuk mencegah terjadinya duplikasi pekerjaan atau kesenjangan tanggung jawab. Dengan demikian, setiap anggota organisasi dapat bekerja dengan fokus dan tanggung jawab yang jelas, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

c) Koordinasi Antarbagian (Coordination Between Units)

Koordinasi antarbagian merupakan proses penyelarasan aktivitas dan komunikasi antarunit dalam organisasi agar tujuan bersama dapat dicapai

secara efektif. Koordinasi yang baik memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih fungsi antarunit serta mencegah konflik internal yang bisa menghambat pencapaian sasaran. Untuk itu, diperlukan mekanisme komunikasi dan kerja sama yang sistematis agar setiap bagian dapat saling mendukung dan tidak bekerja secara terpisah (silo mentality). Peran koordinasi sangat vital dalam menciptakan sinergi antarbagian organisasi

d) Delegasi Wewenang (Delegation of Authority)

Delegasi wewenang adalah proses pendelegasian tanggung jawab dan kekuasaan dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas tertentu. Prinsip ini memungkinkan pimpinan untuk tidak terlalu tersentralisasi dalam pengambilan keputusan, sehingga organisasi dapat bergerak lebih lincah dan responsif. Delegasi yang dilakukan dengan tepat akan meningkatkan efektivitas kerja serta memberdayakan unit-unit pelaksana. Namun, delegasi harus seimbang, artinya wewenang yang diberikan harus sesuai dengan tanggung jawab yang diemban, agar pelaksanaan tugas berjalan optimal tanpa kehilangan kendali atau arah.

Dari empat indikator penilaian diatas dapat menjadi acuan dalam melakukan penilaian terhadap pengorganisasian suatu program apakah telah dilaksanakan dengan baik atau sebaliknya

3. Pelaksanaan (Actuating)

Menurut George R. Terry “Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi

dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan”.¹⁶

Dalam proses manajemen, organisasi atau bisnis dapat mencapai tujuannya tanpa tindakan atau aksi dalam perencanaan yang matang dan struktur organisasi yang kuat. Pergerakan adalah tindakan. Pergerakan pada dasarnya adalah tindakan seorang pemimpin yang mengarahkan, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh bagian struktur organisasi untuk melaksanakan proses manajemen sehingga mereka dapat mencapai tujuan mereka dan berhasil..

Berikut adalah indikator-indikator penilaian fungsi pelaksanaan (actuating) menurut prinsip George Terry.¹⁷

a) Kepemimpinan yang Efektif (Effective Leadership)

Kepemimpinan yang efektif merupakan inti dari fungsi pelaksanaan, di mana seorang pemimpin tidak hanya memerintah, tetapi juga mampu mengarahkan, memotivasi, dan menginspirasi bawahannya. Pemimpin yang efektif memberikan arahan yang jelas, menjaga semangat tim, dan menjadi panutan dalam sikap maupun perilaku. Keteladanan seorang pemimpin menciptakan budaya kerja yang positif dan memperkuat komitmen seluruh anggota organisasi dalam mencapai tujuan bersama.

b) Komunikasi yang Efektif (Effective Communication)

Komunikasi yang efektif adalah kunci kelancaran pelaksanaan tugas. Informasi harus disampaikan secara jelas, akurat, dan tepat waktu kepada semua pihak terkait agar tidak terjadi miskomunikasi yang bisa menghambat

¹⁶ *Ibid Hal 2*

¹⁷ Terry, George R. *Principles of Management*. Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 1960.

proses kerja. Selain itu, komunikasi dua arah antara pimpinan dan bawahan perlu dijaga agar terjadi pertukaran informasi yang sehat, termasuk penyampaian masukan, klarifikasi, maupun umpan balik yang konstruktif. Komunikasi yang baik menciptakan pemahaman bersama dan memperkuat koordinasi antarindividu dan unit.

c) Motivasi Kerja (Work Motivation)

Motivasi kerja berperan penting dalam mendorong karyawan untuk bekerja dengan antusias dan produktif. Organisasi yang mampu memberikan insentif, penghargaan, serta pengakuan terhadap prestasi kerja akan membangkitkan semangat dan loyalitas pegawai. Selain itu, suasana kerja yang mendukung dan penghargaan terhadap kontribusi individu membuat bawahan merasa dihargai, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja secara keseluruhan

d) Koordinasi Pelaksanaan Tugas (Coordination of Task Execution)

Koordinasi dalam pelaksanaan tugas memastikan bahwa seluruh bagian atau unit dalam organisasi bergerak selaras sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Koordinasi yang baik membantu mencegah duplikasi kerja, kesenjangan peran, dan kebingungan antarpegawai. Setiap anggota organisasi perlu memahami apa yang harus dilakukan, kapan harus melakukannya, dan bagaimana berkolaborasi dengan bagian lain untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif.

e) Penyelesaian Masalah Lapangan (Problem Solving in Execution)

Kemampuan menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat menjadi indikator penting dalam keberhasilan pelaksanaan suatu program. Dalam pelaksanaan, sering kali muncul hambatan operasional yang tidak terduga. Oleh karena itu, pemimpin atau pelaksana harus memiliki kecakapan dalam menganalisis situasi, mengambil keputusan yang tepat, dan melaksanakan solusi yang efektif. Respons yang cepat terhadap gangguan operasional mencerminkan ketanggapan organisasi dalam menjaga stabilitas dan kelancaran proses kerja.

Dari 5 indikator diatas dapat menjadi acuan dalam melakukan penilaian terhadap pelaksanaan suatu program apakah telah dilaksanakan dengan baik atau sebaliknya

4. Pengawasan (Controlling)

Menurut Gedorge R. Terry “Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbagikan-perbaikan, sehirngga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selarsas dengan standard (ukuran)”.¹⁸

Pengawasan mempunyai perananarn atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen. Menurut Griffint menjelaskan bahwa ada 3(tiga) tujuan dari pengawasan itu sendiri.¹⁹

¹⁸ *Ibid* Hal 3

- 1) meminimalkan kegagalan
- 2) meminimumkan biaya
- 3) mengantisipasi kompleksitas dari organisasi.

Dalam aktivitas pengawasan seorang pemimpin sangat dibutuhkan dalam menganalisa serta memeriksa dan dapat berkomunikasi dengan baik dengan bawahannya sehingga mendapatkan informasi serta laporan dalam proses manajemen yang dilakukan apakah berjalan baik ataupun tidak sehingga bisa memperhitungkan tingkat keberhasilan yang dihasilkan nantinya.

Berikut indikator penilaian dalam kesesuaian proses pengawasan berdasarkan teori Pengelolaan oleh George R. Terry ²⁰

a) Pengukuran Kinerja yang Akurat (Accurate Performance Measurement)

Pengukuran kinerja yang akurat merupakan langkah awal dalam proses pengawasan yang bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengukuran ini harus dilakukan secara objektif, berbasis data nyata, dan menggunakan metode atau instrumen yang dapat diandalkan. Indikator kinerja yang digunakan juga harus relevan dan mencerminkan secara langsung pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Tanpa pengukuran yang tepat, organisasi tidak dapat mengetahui posisi sebenarnya dari pencapaian kerja, sehingga berisiko dalam pengambilan keputusan.

¹⁹ Adrius Nagong, Studi Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, Vol 8 Desember 2028, Hal 3

²⁰ Terry, George R. *Principles of Management*. Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 1960.

b) Perbandingan Kinerja dengan Standar (Performance Comparison)

Setelah kinerja diukur, langkah berikutnya adalah membandingkan hasil aktual dengan standar atau target yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini penting untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan, kekurangan, atau kelebihan dalam pelaksanaan kegiatan. Jika ditemukan perbedaan, maka perlu dilakukan analisis mendalam untuk mengetahui penyebabnya. Dengan demikian, organisasi dapat menentukan tindakan korektif secara tepat dan mencegah terulangnya masalah yang sama di masa mendatang. Perbandingan ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang bersifat evaluatif dan strategis.

c) Evaluasi dan Umpan Balik (Evaluation and Feedback)

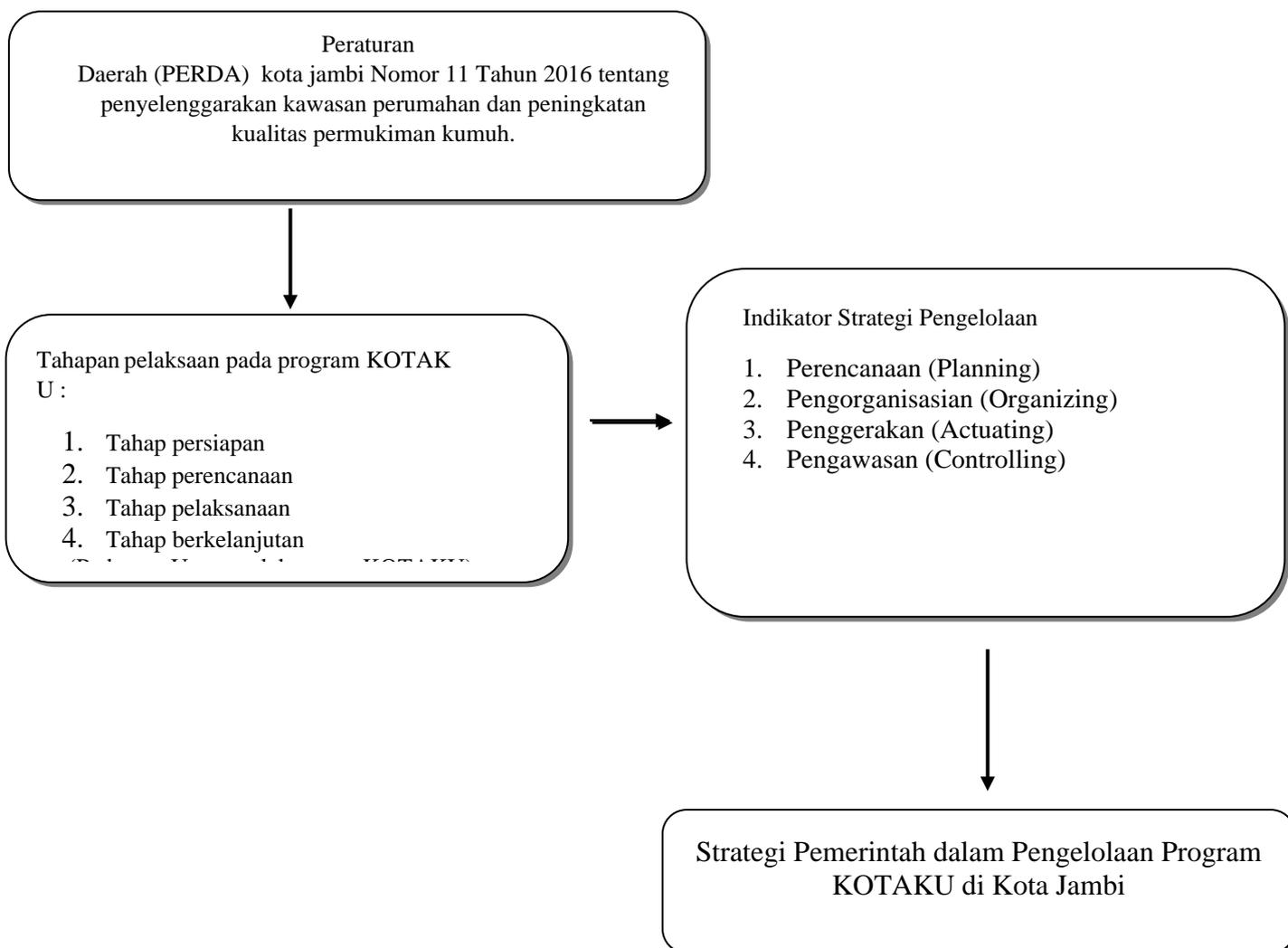
Evaluasi dan umpan balik merupakan tahap akhir dari proses pengawasan yang berperan penting dalam perbaikan berkelanjutan. Informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan harus digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan, serta sebagai bahan pembelajaran untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Pemberian umpan balik kepada pihak terkait harus dilakukan secara konstruktif, jelas, dan solutif, agar dapat diterima dengan baik dan mendorong perbaikan tanpa menimbulkan demotivasi. Evaluasi yang tepat dan umpan balik yang efektif akan membantu organisasi beradaptasi dan berkembang secara berkelanjutan.

Indikator-indikator ini mencerminkan prinsip George Terry bahwa pengawasan bukan sekadar mencari kesalahan, tetapi merupakan alat

manajerial untuk memastikan segala sesuatu berjalan sesuai rencana dan untuk meningkatkan efektivitas organisasi.

Pengawasan sangat berperan penting dalam melihat apakah proses manajemen berjalan dengan baik mencapai tujuan sasaran ataupun sebaliknya. Maka dengan itu langkah yang harus diambil dalam controlling mengamati, menilai, mengevaluasi dan mengoreksi setiap langkah perencanaan berjalan sesuai dengan rencana atau sebaliknya.

1.6. Kerangka Berpikir



1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi dan kemudian melakukan analisis atas data yang dikumpulkan. Metode penelitian memberikan gambaran dari rencana penelitian yang dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah atau menemukan jawaban ilmiah untuk masalah. Penelitian ilmiah adalah proses yang sistematis dan terkendali, hati-hati dan logis, objektif dan empiris, dan terfokus pada masalah yang akan diselesaikan.²¹

1.7.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian kualitatif akan digunakan. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang melihat dan mengungkapkan situasi dan objek dalam konteksnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang dihadapi. Penelitian kualitatif berusaha memahami arti suatu kejadian atau peristiwa dengan berinteraksi dengan orang-orang yang terlibat dalam situasi atau fenomena tersebut.²²

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, dan deskripsi suatu peristiwa yang mengutamakan kualitas. Metode ini digunakan dengan berbagai cara dan disajikan secara cerita.²³ Jenis Penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif, bertujuan

²¹Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*,(Jakarta:Kencana, 2014), hlm. 24.

²² *Ibid*, hlm. 328.

²³ *bid*, hlm. 329.

untuk menyajikan data secara sistematis dan akurat serta menggambarkan dan mendeskripsikan kejadian nyata di lapangan.²⁴

1.7.2. Lokasi/Objek Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kota Jambi pada Objek Program KOTAKU.

1.7.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah rangkaian bentuk susunan masalah yang menjadi inti dari topik penelitian. Harapannya adalah bahwa dengan fokus ini, penelitian akan dapat mengudmpulkan dan menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian. Tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan) menentukan fokus.²⁵

Peneliti akan menemukan fokus penelitian setelah melakukan penjelajahan umum. Dari penjelajahan umum ini, peneliti akan mendapatkan pemahaman umum dan mendalam tentang situasi sosial di kota Jambi. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas, fokus penelitian harus mengenai Strategi Pemerintah untuk Memulai Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Jambi.

1.7.4. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang data; para peneliti kualitatif biasanya memilih

²⁴ Creswell, J.W. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 95

²⁵ Fokus penelitian, Sumber: <https://penelitianilmiah.com/contoh-fokus-penelitian/>, diakses 28 April 2023 Pukul 20.00 WIB.

mengumpulkan data dari berbagai sumber. Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai sumber.:

a. Data Primer

Data Primer dapat didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari lokasi penelitian, seperti percakapan dengan responden atau informan atau wawancara, atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti sendiri dari individu atau kelompok. Data primer dapat berupa kata-kata, kata-kata, gerak-gerik, atau perilaku dari subjek yang dapat dipercaya.

b. Data Sekunder

Sumber data tidak langsung untuk pengumpulan data adalah jurnal, buku, internet, dan bahan lainnya yang diperlukan untuk penelitian.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, informan dikenal. Peneliti mendapatkan informan melalui sampling purposive. Metode pengambilan sampel sumber data menggunakan pertimbangan tertentu terlebih dahulu dikenal sebagai pengambilan sampel purposive. Oleh karena itu, pengambilan sumber informasi atau informan didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penelitian ini memilih informan untuk meneliti "Strategi Pemerintah dalam Pengelolaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Jambi". Berikut beberapa informan yang dipilih:

- 1) Kepala bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 2) Kepala koordinator Program KOTAKU (PERKIM) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi
- 3) Kelurahan Telanai Pura

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi. Dalam wawancara, pewawancara dan sumber informasi berbicara satu sama lain secara langsung tentang subjek yang diteliti. Wawancara terencana-terstruktur, terencana-tidak terstruktur, dan bebas adalah tiga kategori wawancara.

Penulis menggunakan wawancara terencana-terstruktur, di mana pewawancara menyusun rencana atau pedoman pertanyaan secara menyeluruh dan sistematis dengan menggunakan format yang baku. Penulis juga menggunakan wawancara terencana-tidak terstruktur, di mana pewawancara menyusun jadwal wawancara yang kuat, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan gejala yang teliti. Ketika pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan objek

penelitian, kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat ditentukan oleh pengamat sendiri. Keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian bergantung pada pengamat. Observasi ini dilakukan di Kota Jambi dan di bawah tanggung jawab Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jambi.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa, dll. Dokumen seni seperti patung, gambar, film, dll.²⁶

1.7.7. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif didefinisikan sebagai upaya untuk mengorganisasikan, mengorganisasikan, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikontrol, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Peneliti menggunakan metode analisis data dari model Miles dan Huberman di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, menurut buku Sugiyono, analisis data dilakukan selama periode pengumpulan data dan setelahnya.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit

Analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi berarti memilih data atau informasi yang relevan dari pengumpulan data yang relevan dengan subjek penelitian. Penyajian adalah menampilkan atau menunjukkan data (informasi) yang dikumpulkan selama proses pengumpulan data. Penarikan kesimpulan merupakan proses analisis data atau informasi yang kemudian bermuara pada kesimpulan penelitian.

1.7.8. Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik untuk menguji data hasil penelitian untuk keabsahan dan kebenaran dengan menggunakan berbagai pendekatan. Triangulasi adalah metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai sumber data dan pendekatan yang sudah ada. Peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitasnya, yaitu menguji kredibilitas pengumpulan dan berbagai sumber data. Empat jenis triangulasi berbeda

- 1) Triangulasi Data terdiri dari penggunaan berbagai sumber data dalam penelitian;
- 2) Triangulasi Peneliti terdiri dari penggunaan beberapa peneliti dari berbagai disiplin ilmu dalam suatu penelitian;
- 3) Triangulasi Teori dan Teknik Metodologis terdiri dari penggunaan sejumlah perspektif dalam menafsirkan satu set data; dan

- 4) Triangulasi Teknik terdiri dari penggunaan sejumlah perspektif dalam menafsirkan satu set data.²⁷

²⁷ *Ibid*, Hlm.248